

## **BAB II**

# **SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILIPINA DARI ERA KOLONIAL HINGGA SEKARANG**

Filipina adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, negara ini berbentuk republik dan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia yang dibagian utara dan timurnya berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, sebelah selatan dengan Indonesia, dan sebelah Barat dengan Malaysia serta Laut China Selatan. Filipina juga dianggap sebagai negara di Asia Tenggara yang dipengaruhi kuat oleh bangsa Barat yang pernah menjajah mereka yaitu Amerika Serikat dan Spanyol. Pada BAB II ini, penulis akan menjelaskan tentang sejarah Filipina mulai dari masa kolonialisme Spanyol dan Amerika Serikat, masa awal kemerdekaan, hingga pergolakan politik yang mewarnai perjalanan Negara Filipina hingga saat ini.

### **A. Filipina Di Era Kolonialisme**

#### **1. Masa Kolonialisme Spanyol**

Motif kedatangan Spanyol di Filipina tidak sepenuhnya bersifat komersial. Awalnya bangsa Spanyol memandang Filipina sebagai batu loncatan untuk mengeruk kekayaan Hindia Timur (Kepulauan Rempah-Rempah/Maluku), tetapi setelah Portugis dan Belanda menutup kemungkinan itu Spanyol tetap mempertahankan keberadaan mereka di kepulauan Filipina. Kedatangan pertama Spanyol di Filipina dipimpin oleh seorang navigator dan penjelajah berkebangsaan Portugis, yaitu Ferdinand Magellan yang membawa kapal Spanyol pertama ke Filipina ketika ia mendarat di Cebu pada Maret 1521. Tidak

lama kemudian, Ferdinand mendadak mati di pulau Mactan. Kemudian Raja Philip II (asal-usul nama Filipina) mengirim kembali tiga kapal ekspedisi lebih lanjut yang berakhir dengan bencana, Ia mengirim Miguel López de Legazpi yang mendirikan pemukiman Spanyol permanen pertama di Cebu pada 1565. Kota Spanyol di Manila adalah didirikan pada 1571 dan pada akhir abad ke-16 sebagian besar wilayah pesisir dan dataran rendah dari Luzon ke Mindanao utara berada di bawah kendali Spanyol. Para biarawan berbaris dengan tentara dan segera menyelesaikan konversi nominal ke Katolik Roma dari semua orang lokal di bawah pemerintahan Spanyol. Tetapi orang-orang Muslim di Mindanao dan Sulu, yang oleh orang Spanyol disebut orang Moro, tidak pernah sepenuhnya ditundukkan oleh Spanyol.

Aturan Spanyol untuk 100 tahun pertama dilaksanakan di sebagian besar wilayah melalui jenis pajak pertanian yang diimpor dari Amerika dan dikenal sebagai *encomienda*. Namun perlakuan kasar terhadap pembayar upeti lokal dan pengabaian instruksi agama oleh *encomenderos* (pengumpul upeti), serta seringnya pemotongan pendapatan (korupsi) dari para *encomenderos*, menyebabkan Spanyol meninggalkan sistem tersebut pada akhir abad ke-17. Gubernur Jenderal, yang ditunjuk sendiri oleh Raja Spanyol, mulai menunjuk Gubernur Sipil untuk wilayah lokal di Filipina dan militernya sendiri untuk memerintah secara langsung<sup>1</sup>.

Pemerintah pusat di Manila mempertahankan peran Abad Pertengahan hingga Abad ke-19 dan peran dari Gubernur Jenderal sangat kuat sehingga Ia sering disamakan dengan Raja (independen). Dia mendominasi *Audiencia* atau pengadilan tinggi, lalu menjabat sebagai Panglima tertinggi angkatan bersenjata Filipina, dan menikmati hak istimewa untuk

---

<sup>1</sup> <https://www.britannica.com/place/Philippines/Sports-and-recreation#ref214501>

terlibat langsung dalam setiap perdagangan di wilayah Filipina untuk keuntungan pribadi sang Gubernur Jenderal.

Kota Manila sangat mendominasi pulau-pulau lainnya di Filipina, karena Manila tidak hanya sebagai ibukota politik tetapi juga sebagai pusat perdagangan dengan memastikan keunggulan komersial Manila juga. Pertukaran perdagangan sutera China dengan perak Meksiko di Manila membuat orang-orang Spanyol mencari keuntungan dengan cepat, dan juga menarik komunitas China yang besar ke Filipina. Orang-orang China, meskipun menjadi korban pembantaian berkala ditangan Spanyol yang mencurigakan, tetap bertahan dan segera membangun dominasi perdagangan yang bertahan selama berabad-abad di Filipina.

Manila selain sebagai Ibukota pemerintahan dan pusat perdagangan, juga merupakan ibukota gerejawi Filipina. Gubernur Jenderal adalah kepala sipil gereja di pulau-pulau itu, tetapi Uskup Agung bersaing dengannya untuk mendapatkan supremasi politik. Pada akhir abad 17 dan 18 Uskup Agung, yang juga memiliki status hukum Gubernur, sering menang. Menambah kekuatan politik mereka, perintah agama, rumah sakit dan sekolah Katolik Roma, serta para Uskup memperoleh kekayaan besar, sebagian besar di tanah. Hibah dan rancangan kerajaan membentuk inti dari kepemilikan mereka, tetapi banyak perpanjangan sewenang-wenang dibuat di luar batas hibah asli .

Kekuatan gereja berasal tidak hanya dari kekayaan dan status resmi. Para imam dan biarawan memiliki perintah bahasa lokal yang jarang di antara orang Spanyol awam, dan di provinsi mereka kalah jumlah pejabat sipil. Dengan demikian, mereka adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi pemerintah kolonial. Tujuan budaya dari pendeta Spanyol tidak lain adalah Kristenisasi penuh dan

Hispanik di Filipina. Dalam dekade pertama pekerjaan misionaris, agama-agama lokal ditekan dengan penuh semangat dengan cara menghapus semua praktik lama agama lokal dan tidak ditoleransi sedikitpun. Tetapi ketika umat awam Kristen bertambah jumlahnya dan semangat para *klerus* berkurang, semakin sulit untuk mencegah pelestarian kepercayaan dan kebiasaan kuno di bawah pengaruh Katholik Roma. Dengan demikian, bahkan di bidang agama, budaya Filipina pra-Spanyol tidak sepenuhnya dihancurkan.

Lembaga-lembaga ekonomi dan politik juga diubah di bawah pengaruh Spanyol tetapi mungkin kurang teliti dalam di bidang agama. Para pendeta mencoba memindahkan semua masyarakat atau Jemaat ke *pueblos* atau desa-desa untuk mengelilingi gereja-gereja batu besar. Tetapi pola demografis yang tersebar dari *barangay* lama sebagian besar bertahan. Namun demikian, posisi yang pernah turun temurun menjadi tunduk pada penunjukan oleh pemerintahan lokal Spanyol.

Teknologi pertanian berubah sangat lambat hingga akhir Abad ke-18, karena perladangan berpindah secara bertahap membuka jalan bagi pertanian menetap yang lebih intensif, sebagian dibawah bimbingan para biarawan. Konsekuensi sosial ekonomi dari kebijakan Spanyol yang menyertai perubahan ini memperkuat perbedaan kelas. Datus dan perwakilan lainnya dari kelas bangsawan tua mengambil keuntungan dari pengenalan konsep Barat tentang kepemilikan absolut tanah untuk diklaim sebagai ladang mereka sendiri yang diolah oleh berbagai pengikut mereka, meskipun hak tanah tradisional telah dibatasi untuk hasil produksi. Ahli waris bangsawan pra-Spanyol ini dikenal memainkan peran penting dalam pemerintahan lokal yang didominasi biarawan.

Pada akhir Abad ke-18, perubahan politik dan ekonomi di Eropa akhirnya mulai mempengaruhi Spanyol dan berdampak juga pada pengaruh mereka di Filipina. Penting sebagai stimulus untuk perdagangan adalah penghapusan bertahap monopoli yang dinikmati oleh galleon ke Acapulco. Galleon terakhir tiba di Manila pada tahun 1815, dan pada pertengahan 1830-an Manila terbuka untuk pedagang asing hampir tanpa batasan. Permintaan gula Filipina dan *abaca* (rami) tumbuh dengan cepat, dan volume ekspor ke Eropa meningkat lebih jauh setelah selesainya Terusan Suez pada tahun 1869.

Pertumbuhan pertanian komersial menghasilkan munculnya kelas baru. Bersamaan dengan kepemilikan tanah gereja dan perkebunan padi para bangsawan pra-Spanyol ada *hacienda* kopi, rami, dan gula, sering kali milik *mestizo* China-Filipina yang giat. Beberapa keluarga petani penghasil produk-produk ekspor yang menjadi terkenal di Abad ke-19 terus memainkan peran penting dalam ekonomi dan politik Filipina pada masa tersebut.

Pada tahun 1863, dibuka pendidikan publik (rakyat) di Filipina dan kemudian gereja yang mengendalikan kurikulum dari sekolah rakyat tersebut. Tudak kurang dari seperlima dari mereka yang bersekolah dapat membaca dan menulis dalam bahasa Spanyol, namun jauh lebih sedikit yang bisa berbicara dengan benar. Pendidikan tinggi yang terbatas di Filipina sepenuhnya di bawah arahan kependetaan, tetapi pada tahun 1880-an banyak anak orang kaya dikirim ke Eropa untuk belajar. Di sana, nasionalisme dan hasrat untuk reformasi berkembang di atmosfer liberal. Dari kelompok siswa Filipina luar negeri yang berbakat ini muncul apa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Propaganda. Majalah, puisi, dan pamflet berkembang pesat. José Rizal, salah satu tokoh paling cerdas dari gerakan ini, menghasilkan

dua novel politik yaitu, *Noli me tangere* (1886; *Touch Me Not*) dan *El filibusterismo* (1891; *The Reign of Greed*) yang memiliki dampak luas di Filipina.

Pada tahun 1892, José Rizal kembali ke Filipina dan membentuk Liga Filipina yaitu sebuah gerakan masyarakat yang sebenarnya berpikiran reformasi sederhana yang loyal kepada Spanyol dan tidak mengembuskan kata kemerdekaan. Tetapi Rizal dengan cepat ditangkap oleh orang Spanyol yang terlalu takut, diasingkan ke sebuah pulau terpencil di Selatan dan akhirnya dieksekusi pada tahun 1896. Sementara itu, di Filipina ada komitmen kuat terhadap kemerdekaan di antara kelas yang agak kurang istimewa.

Terkejut dengan penangkapan Rizal pada tahun 1892, para aktivis ini dengan cepat membentuk Katipunan di bawah kepemimpinan Andres Bonifacio, seorang pekerja gudang yang belajar sendiri. Katipunan didedikasikan untuk pengusiran orang Spanyol dari pulau-pulau dan persiapan dibuat untuk pemberontakan bersenjata. Pemberontak Filipina telah banyak dalam sejarah pemerintahan Spanyol, tetapi sekarang untuk pertama kalinya mereka terinspirasi oleh ambisi nasionalis dan memiliki pendidikan yang diperlukan untuk membuat kesuksesan menjadi kemungkinan nyata.

## **2. Masa Kolonialisme Amerika Serikat**

Pada Agustus 1896, para biarawan Spanyol menemukan bukti rencana Katipunan dan para pemimpinnya dipaksa melakukan tindakan prematur. Pemberontakan pecah di beberapa provinsi di sekitar Manila. Setelah berbulan-bulan bertempur, pembalasan dendam Spanyol memaksa pasukan revolusioner mundur ke bukit. Pada bulan Desember 1897 gencatan senjata diakhiri dengan Spanyol. Emilio Aguinaldo, walikota dan komandan pasukan

pemberontak, dibayar dalam jumlah besar dan diizinkan pergi ke Hong Kong dengan para pemimpin lainnya dan Spanyol juga menjanjikan reformasi dalam pemerintahan lokal Spanyol. Tetapi reformasi berjalan lambat, dan gerombolan kecil pemberontak, yang tidak percaya pada janji Spanyol mengangkat senjata mereka kembali dan bentrokan semakin sering terjadi di beberapa wilayah Filipina.

Sementara itu, diwaktu yang hampir bersamaan pecah perang antara Spanyol dan Amerika Serikat (AS). Setelah kemenangan angkatan laut AS dalam Pertempuran Teluk Manila pada Mei 1898, Aguinaldo dan rombongannya kembali ke Filipina dengan bantuan Laksamana George Dewey. Percaya dukungan AS, Aguinaldo mengatur kembali pasukannya dan segera membebaskan beberapa kota di selatan Manila. Sementara itu, pasukan AS mendarat di kota Manila dengan bantuan penting dari pasukan kemerdekaan Filipina. Pada 8 Agustus, komandan Spanyol menginformasikan kepada pasukan Amerika bahwa dia akan menyerahkan Manila dengan dua syarat. Pertama, Spanyol meminta pasukan AS berjalan memasuki Manila layaknya sedang bertempur dan syarat kedua adalah melarang pemberontak Filipina masuk ke Manila. Pada 13 Agustus digelarlah perang pura-pura di Manila dan pasukan AS memegang janjinya dengan mencegah pasukan Filipina masuk ke dalam kota. Saat AS menduduki Manila dan merencanakan negosiasi damai dengan Spanyol, Aguinaldo memiliki kegiatan lain. Dia membentuk sebuah dewan revolusioner, Malolo, pada September. Dewan ini kemudian membentuk konstitusi demokratis pertama di Asia. Setelah pemerintahan terbentuk maka dipilihlah Aguinaldo sebagai presiden pada Januari 1899.

Pada 4 Februari 1900, terjadi peristiwa yang disebut sebagai kebangkitan Filipina terjadi ketika

para pemberontak bertempur melawan pasukan AS di Manila. Dua hari kemudian Senat AS meratifikasi Kesepakatan Paris dengan Spanyol. Isi kesepakatan itu adalah Filipina kini adalah wilayah AS dan diminta membayar 20 juta emas kepada Spanyol sebagai kompensasi. Sebagai respon atas pengkhianatan ini, Aguinaldo menggelar kembali revolusi kali ini melawan AS. Namun upaya tersebut gagal karena pasukan Filipina kalah dalam perang terbuka, akhirnya Aguinaldo mengubah strategi menjadi perang gerilya yang merepotkan AS. Oleh karena hal tersebut kemudian Kongres AS mengizinkan pengiriman 60.000 tentara untuk mengakhiri pemberontakan di Filipina. Pada akhir 1899, terdapat 65.000 tentara Amerika di Filipina tetapi perang terus berlanjut. Pencaplokan Filipina mendapat banyak tentangan di Amerika termasuk dari kandidat presiden Partai Demokrat William Jennings Bryan.

Namun, pada November 1900 petahana William McKinley memenangkan pemilihan presiden dan perang berlanjut. Pada 23 Maret 1901, dalam sebuah operasi militer, Jenderal Frederick Funston dan sekelompok tentara menyamar sebagai tawanan melakukan serangan mendadak ke kubu Aguinaldo di desa Palanan, di Pulau Luzon. Pasukan AS sukses menangkap Aguinaldo yang kemudian menyatakan sumpah setia kepada AS dan menyerukan penghentian perlawanan. Meski demikian, perlawanan terus berlangsung tetapi berangsur-angsur bisa dipatahkan meski menjatuhkan korban yang sangat banyak. Pada tahun 1902, pemerintahan sipil AS menguasai Filipina dan pemberontakan selamam tiga tahun dinyatakan berakhir. Meski perlawanan secara sporadis masih berlangsung selama beberapa tahun berikutnya. Lebih dari 4.000 tentara Amerika tewas di Filipina atau lebih banyak 10 kali lipat dari korban dalam Perang AS-Spanyol. Sementara lebih dari 20.000 warga Filipina

tewas dan jumlah yang hilang tak pernah diketahui keberadaannya.

Usaha penyamaan demokrasi yang diberlakukan di AS dan yang kemudian diimplementasikan dalam pemerintahan local Filipina yang selama ini sudah terbiasa dengan system kerajaan terhadap rakyatnya cukup menggelisahkan bagi sebagian besar warga AS sendiri. Sejak awal, pelatihan terhadap orang Filipina untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan akan diberikan kemerdekaan pada akhirnya adalah rasionalisasi penting bagi hegemoni AS di Kepulauan Filipina. Perbedaan kebijakan antara dua partai politik utama di AS berfokus pada bagaimana pemerintahan lokal Filipina sendiri harus dilakukan dan tanggal berapa kemerdekaan terhadap Filipina harus diberikan.

Pada tahun 1899, Presiden William McKinley mengirim utusan untuk berkunjung ke Filipina. Utusan ini merupakan komisi pencarian fakta yang terdiri dari lima orang yang dipimpin oleh Presiden Universitas Cornell Jacob G. Schurman. Schurman melaporkan kembali bahwa orang Filipina menginginkan kemerdekaan mutlak, tetapi ini tidak memiliki dampak langsung pada kebijakan AS terhadap Filipina. Kemudian Preside McKinley mengirimkan kembali kemabli Komisi untuk Filipina yang kedua pada tahun 1900, dibawah kepemimpinan William Howard Taft yang kemudian pada Juli 1901 telah membentuk pemerintahan sipil di Filipina.

Pada tahun 1907, Komisi untuk Filipina yang bertindak sebagai kabinet legislatif dan Gubernur Jenderal, menjadi majelis tinggi badan bikameral. Terdiri dari 80 anggota baru Majelis Filipina langsung dipilih oleh pemilih yang agak terbatas dari distrik-distrik di beberapa wilayah Filipina, hal ini menjadikannya badan legislatif elektif pertama di Asia Tenggara. Ketika Gubernur Jenderal Francis B.

Harrison menunjuk mayoritas Filipina untuk komisi pada tahun 1913, suara Amerika dalam proses legislatif semakin berkurang.

Harrison adalah satu-satunya gubernur jenderal yang ditunjuk oleh presiden Demokrat dalam 35 tahun pertama pemerintahan AS. Dia telah dikirim oleh Woodrow Wilson dengan instruksi spesifik untuk mempersiapkan Filipina menuju kemerdekaan akhir, sebuah tujuan yang didukung dengan penuh semangat oleh Wilson. Selama masa jabatan Harrison, Kongres yang dikontrol Demokrat di Washington, D.C., bergegas untuk memenuhi janji kampanye lama untuk tujuan yang sama. Undang-Undang Jones yang disahkan pada tahun 1916, akan menetapkan tanggal pasti untuk pemberian kemerdekaan jika Senat memiliki jalannya sendiri, tetapi Parlemen AS mencegah tindakan seperti itu. Dalam bentuk akhirnya tindakan itu hanya menyatakan bahwa itu adalah tujuan rakyat AS untuk mengakui kemerdekaan Filipina. Segera setelah terciptanya pemerintah yang stabil dapat dibentuk di dalamnya.

Pentingnya yang lebih besar adalah sebagai tonggak dalam pengembangan Otonomi Filipina. Di bawah ketentuan Undang-Undang Jones, komisi itu dihapuskan dan digantikan oleh Senat yang beranggotakan 24 orang, hampir seluruhnya dipilih. Para pemilih diperluas untuk mencakup semua laki-laki yang melek huruf. Namun, beberapa pembatasan substansial pada otonomi Filipina tetap ada. Pertahanan dan urusan luar negeri tetap menjadi hak prerogatif eksklusif AS. Arah AS untuk urusan dalam negeri Filipina dilakukan terutama melalui Gubernur Jenderal. Namun, ada sedikit lebih dari satu dekade administrasi AS yang menyeluruh di Filipina tersebut terlalu singkat untuk membangun pola yang bertahan lama. Sedangkan AS membentuk 51 persen dari layanan sipil pada tahun 1903, mereka hanya 29

persen pada tahun 1913 dan 6 persen pada tahun 1923. Pada tahun 1916, dominasi Filipina di pemerintahan dalam bidang legislatif dan yudisial juga berfungsi membatasi peran eksekutif dan administrasi AS.

Pada tahun 1925, satu-satunya perwakilan AS yang tersisa di Kabinet Gubernur Jenderal adalah sekretaris instruksi publik yang juga merupakan Gubernur Jenderal Letnan. Hal ini adalah salah satu indikasi prioritas tinggi yang diberikan untuk pendidikan dalam kebijakan AS. Pada tahun-tahun awal peraturan AS ini diberlakukan, ratusan guru sekolah berasal dari AS didatangkan ke Filipina. Guru-guru lokal Filipina dilatih dengan sangat cepat sehingga pada tahun 1927 Filipina memiliki hampir 26.200 guru untuk sekolah umum. Populasi sekolah bertambah lima kali lipat dalam satu generasi, dimana pendidikan menghabiskan setengah dari pengeluaran pemerintah di semua tingkatan, dan kesempatan pendidikan di Filipina lebih besar daripada di koloni lain di Asia.

Sebagai konsekuensi dari ledakan ini, tingkat melek huruf hampir dua kali lipat pada tahun 1930-an, masyarakat Filipina yang berpendidikan memperoleh bahasa yang sama dan kunci linguistik untuk peradaban Barat. Pada tahun 1939, sekitar seperempat dari populasi dapat berbicara bahasa Inggris, proporsi yang lebih besar daripada dialek asli mana pun. Mungkin yang lebih penting adalah jalan baru mobilitas sosial ke atas yang ditawarkan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah satu-satunya upaya AS yang berhasil untuk membangun basis sosio-kultural untuk demokrasi politik di Filipina.

Upaya Amerika untuk menciptakan kesetaraan peluang ekonomi lebih sederhana dan kurang berhasil. Di negara yang didominasi pertanian, pola kepemilikan tanah sangat penting. Kecenderungan menuju konsentrasi kepemilikan yang lebih besar,

yang dimulai pada abad ke-19 berlanjut selama masa kolonialisme AS di Filipina, meskipun ada beberapa hambatan hukum. Perkebunan-perkebunan milik AS yang luas dihalang-halangi, tetapi pembatasan hukum hanya berdampak kecil pada orang-orang Filipina yang memiliki koneksi politik baik yang berniat mengumpulkan kekayaan. Persentase petani di bawah masa sewa saham dua kali lipat antara 1900 dan 1935 dan rasa frustrasi para penyewa lahan meletus dalam tiga pemberontakan kecil yang terjadi di Pulau Luzon Tengah selama tahun 1920-an dan 1930-an.

Kebijakan perdagangan AS yang kondusif untuk difusi kekuatan ekonomi. Dimulai pada tahun 1909, Undang-Undang Tarif Payne-Aldrich mengizinkan masuknya produk Filipina secara gratis ke pasar AS, pada saat yang sama produk AS yang sebagian besar diproduksi di Filipina dibebaskan dari tarif di Filipina. Aliran bebas dari impor AS adalah faktor kuat untuk pertumbuhan industri Filipina. Hasil pertanian berorientasi ekspor, terutama gula sangat laku di pasar AS yang dilindungi. Pemilik pabrik dan perkebunan mendapatkan keuntungan yang paling besar, sehingga memperkuat dominasi politik dari elit yang memiliki perusahaan gula.

Persiapan yang dilakukan AS terhadap Filipina untuk menuju pemerintahan yang demokrasi menderita kontradiksi yang melekat, mungkin tidak diakui pada saat itu. Tanggung jawab pemerintah lokal kepada AS tidak konsisten dengan membangun basis sosial dan ekonomi bagi demokrasi politik. Pemerintahan mandiri Filipina berarti seluruh kebutuhan, asumsi kekuasaan oleh orang-orang Filipina yang sudah dalam posisi kepemimpinan dalam masyarakat. Tapi yang muncul sebagian besar berasal dari elit lama Filipina yang berusaha melestarikan posisi politik dan ekonomi mereka agar tidak tergoyahkan. Bahkan perluasan kelas menengah

terdidik tidak selalu menghasilkan transformasi dari pola kekuasaan. Kebanyakan calon kelas menengah untuk kepemimpinan politik disesuaikan dengan nilai-nilai dan praktik elite kekuasaan yang sudah ada sebelumnya.

Para pemimpin elit Filipina dengan cepat dan terampil memanfaatkan peluang untuk pemerintahan sendiri ketika AS membuka itu untuk mereka. Partai Federal menjadi partai yang didukung oleh AS dan menekankan kerja sama antara AS dengan tuan tanah, bahkan hingga mencapai status kenegaraan bagi Filipina. Tetapi ketika seruan nasionalis secara terbuka diizinkan dalam pemilihan 1907, Partai Nasionalista yang mengadvokasi kemerdekaan, menang luar biasa. Tetapi baik kaum Progresif maupun penerus mereka pada 1920-an, tidak pernah mendapatkan lebih dari sepertiga kursi di legislatif. The Nacionalista Party dibawah pimpinan Manuel Quezon dan Sergio Osmena mendominasi politik Filipina dari tahun 1907 sampai kemerdekaan. Lebih penting dari persaingan antara Nacionalistas dan oposisi mereka adalah persaingan berkelanjutan antara Quezon dan Osmeña. Bahkan, memahami konflik kepribadian ini memberikan wawasan yang lebih dalam realitas politik Filipina sebelum perang daripada kebijakan atau ideologi.

Pada tahun 1933, Kongres AS mengeluarkan Undang-Undang Pematangan Hare-Hawes yang menetapkan tanggal untuk kemerdekaan Filipina. Tindakan itu merupakan pemenuhan janji yang tidak jelas dalam *Jones Act*. Hal itu juga responsif terhadap tuntutan serangkaian "misi kemerdekaan" yang dikirim ke Washington oleh badan legislatif Filipina. Tetapi pemindahan kedaulatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini diputuskan pada masa-masa kelam Depresi Besar tahun 1930-an. Depresi telah menyebabkan kepentingan pertanian Amerika mencari

mati-matian untuk bantuan, dan mereka yang menderita luka nyata atau imajiner dari persaingan produk Filipina berusaha untuk mengecualikan produk tersebut. Mereka telah gagal dalam upaya langsung untuk mengubah tarif impor Filipina tetapi menemukan bahwa jubah terhormat advokasi kemerdekaan meningkatkan efektivitas upaya mereka. Terikat dengan kemerdekaan adalah akhir dari masuknya bebas ke pasar-pasar Amerika gula Filipina, minyak kelapa, tali, dan barang-barang lain yang kurang penting. Bahwa kepentingan ekonomi itu mampu mencapai apa yang mereka lakukan sebagian dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pengaruh politik mereka sangat baik dibandingkan dengan kelompok kecil pedagang dan investor Amerika di Filipina.

Legislatif Filipina menolak Undang-Undang Pemotongan Hare-Hawes, tampaknya sebagai akibat dari pertikaian Osmeña dan Quezon, banyak yang membuat para pejabat Amerika tidak senang. Tetapi, ketika Quezon datang ke Washington pada tahun berikutnya untuk bekerja untuk rancangan undang-undang baru, aliansi kekuatan yang sama dalam Kongres AS diwajibkan dengan membuat UU Tydings-McDuffie yang hampir identik. Didukung oleh Quezon dan diterima dengan cepat oleh badan legislatif Manila, itu memberikan persemakmuran 10 tahun di mana AS akan mempertahankan yurisdiksi atas urusan pertahanan dan luar negeri. Filipina harus menyusun konstitusi mereka sendiri dengan persetujuan Presiden AS.

Sebuah konvensi konstitusi dengan cepat dipilih dan sebuah konstitusi yang dibingkai dan disetujui oleh Presiden Franklin D. Roosevelt. Gubernur Jenderal terakhir, Frank Murphy menjadi komisaris tinggi pertama dengan lebih banyak peran diplomatik daripada pemerintahan. Persemakmuran diresmikan pada 15 November 1935 dimana Partai Nacionalista

memperbaiki perselisihan internalnya dan mencalonkan Quezon sebagai presiden dan Osmeña sebagai wakil presiden. Masa persemakmuran dimaksudkan untuk dikhususkan untuk persiapan bagi kemandirian ekonomi dan politik dan kesempurnaan lembaga-lembaga demokratis di Filipina. Tetapi peristiwa tragis Perang Dunia II menyebabkan transisi pemerintahan ini tidak berjalan dengan lancar.

## **B. Perjuangan Kemerdekaan**

### **1. Perang Dunia II Sebagai Pemicu**

Agresi militer yang dilakukan Jepang terhadap wilayah Tiongkok mendorong banyak perhatian pada kesiapan militer di wilayah koloni di Asia Pasifik. Hampir seperempat dari anggaran nasional Filipina saat itu dikhususkan untuk pertahanan. Jenderal Douglas MacArthur, pensiun sebagai kepala staf tentara di Washington dipanggil oleh Presiden Quezon untuk mengarahkan rencana dan persiapan Filipina untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Sementara itu, kerusuhan agraria merebak dan aktivitas politik kiri (komunis dan sosialis) tumbuh pesat. Quezon mendorong undang-undang reformasi yang signifikan melalui Majelis Nasional, tetapi implementasinya lemah meskipun akumulasi kekuatan yang cepat di tangannya.

Serangan Jepang ke Filipina pada 8 Desember 1941, terjadi pada saat penumpukan militer AS di Filipina belum dilakukan. Pergerakan militer Jepang sangat cepat, bahkan sebelum Natal kota Manila dinyatakan telah dikuasai Jepang. Sementara itu, Quezon dan Osmeña dievakuasi ke markas MacArthur di Pulau Corregidor. Meskipun ada keinginan untuk kembali ke Manila dan menyerah kepada Jepang, namun Quezon berhasil dibujuk AS untuk

meninggalkan Filipina pada Maret 1942 dengan kapal selam AS. Pasukan Filipina dan AS dibawah Jenderal Jonathan M. Wainwright menyerah pada bulan Mei 1942. Komisi Eksekutif yang beranggotakan lebih dari 30 anggota elit politik Filipina lama telah bekerja sama dengan otoritas militer Jepang di Manila sejak Januari 1943.

Komisi Eksekutif berlangsung hingga September 1943, ketika digantikan oleh “Republik Filipina yang merdeka”. Presiden Filipina yang dipilih oleh Jepang adalah José Laurel, seorang mantan Hakim Agung dari Mahkamah Agung persemakmuran dan satu-satunya warga Filipina yang memiliki gelar kehormatan dari Universitas Kekaisaran Tokyo. Lebih dari separuh Senat Persemakmuran dan lebih dari sepertiga anggota parlemen bertugas pada satu waktu di rezim yang disponsori Jepang. Namun, kerja sama Filipina dengan Jepang tidak terlalu berjalan dengan baik atau seluas seperti di tempat lain di Asia Tenggara.

Bahkan, sebelum jatuhnya Semenanjung Bataan ke Jepang pada bulan April 1942, satuan gerilyawan terbentuk di seluruh Filipina. Sebagian besar dipimpin oleh perwira kelas menengah dan yang pro terhadap AS. Di Pulau Luzon, bagaimanapun kekuatan utama adalah Hukbalahap yang di bawah kepemimpinan komunis, memanfaatkan kerusuhan agraria sebelumnya. Meskipun dalam beberapa kasus, banyak gerilyawan di bukit merasa sedih terhadap mereka yang tampaknya mendapat manfaat dari pendudukan. Perbedaan antara kedua kelompok menjadi faktor penting dalam politik pasca perang awal.

Segera setelah pendaratan AS di Leyte pada Oktober 1944, diperintahkan oleh MacArthur pemerintahan sipil dikembalikan ke persemakmuran. Sergio Osmeña, yang telah menjadi Presiden Filipina setelah kematian Quezon di pengasingan pada bulan

Agustus 1944, memiliki sedikit sumber daya untuk mengatasi masalah yang dihadapi Filipina. Namun, peran Osmeña diperumit oleh fakta bahwa MacArthur memilih untuk membangga-banggakan Manuel A. Roxas, yaitu seorang kolaborator terkemuka yang juga telah melakukan kontak dengan intelijen militer AS. Roxas dinominasikan pada Januari 1946 dalam konvensi terpisah Partai Nacionalista, seperti yang pertama kali disebut maka lahirlah partai politik besar kedua Filipina yaitu Partai Liberal.

Osmeña meskipun memiliki kelebihan sebagai pemegang jabatan, sudah tua dan lelah dan tidak sepenuhnya menggunakan alat politik yang dimilikinya. Pada bulan April 1945, Roxas terpilih dengan selisih yang kecil. Pada bulan berikutnya Ia dilantik sebagai kepala eksekutif persemakmuran terakhir dan pada 4 Juli 1946, ketika Republik Filipina diproklamasikan Ia menjadi Presiden pertama Filipina setelah resmi menjadi negara merdeka.

## **2. Filipina Memperoleh Kemerdekaan**

Roxas seperti yang diharapkan mampu memperluas amnesti ke semua kolaborator utama dengan Jepang. Dalam kampanyenya untuk pemilihan Presiden 1949 ada upaya untuk mengangkat masalah kolaborasi melawan José Laurel yang merupakan kandidat presiden dari Partai Nacionalista, tetapi itu tidak efektif. Pada masa tersebut politik Filipina terpolarisasi menjadi dua kubu, yaitu "gerilyawan" dan "kolaborator" pada saat itu dapat ditemukan di kedua sisi dari semua elit politik Filipina.

Filipina telah memperoleh kemerdekaan dari AS, namun pertempuran hebat terutama di sekitar Manila pada hari-hari terakhir kekuasaan Jepang Filipina (Februari – Maret 1945) hampir menghancurkan seluruh ibukota Negara tersebut. Ekonomi pada

umumnya berantakan dan bantuan untuk rehabilitasi jelas diperlukan. Roxas bersedia menerima beberapa kondisi berat yang ditempatkan secara implisit dan eksplisit oleh Kongres AS. *Bell Act* di AS memperluas perdagangan bebas dengan Filipina selama 8 tahun dan diikuti oleh 20 tahun kenaikan tarif secara bertahap. AS menuntut mendapatkan sewa selama 99 tahun atas sejumlah Pangkalan Militer dan angkatan laut Filipina dibawah otoritas AS dan juga memiliki hak teritorial virtual. Akhirnya, sebagai persyaratan khusus untuk pembebasan pembayaran ganti rugi perang AS, maka Filipina harus mengamandemen Konstitusi untuk memberikan hak yang setara kepada warga negara AS dengan warga Filipina dalam eksploitasi sumber daya alam yang disebut dengan Amandemen Paritas.

Perubahan karakter hubungan Filipina dan AS menjadi tema utama dalam sejarah Filipina selama beberapa dekade pertama setelah perang. Kecenderungannya adalah melemahnya hubungan itu yang dibuktikan dengan diversifikasi hubungan eksternal Filipina dan sebagian lagi oleh perasaan anti-AS yang lebih jelas dari rakyat Filipina. Nasionalisme ekonomi, meskipun pertama-tama diarahkan melawan dominasi komunitas Tionghoa lokal terhadap perdagangan eceran, maka pada 1950-an hal tersebut difokuskan pada status khusus perusahaan-perusahaan bisnis AS di Filipina<sup>2</sup>.

Pada saat kemerdekaan, ikatan militer dengan AS sama kuatnya dengan hubungan ekonomi. Pasukan Filipina bertempur melawan pasukan komunis di Korea dan para insinyur yang tidak berperang menambah pasukan AS dalam Perang Vietnam. Hal

---

<sup>2</sup> KOMPAS. 2017. *Hari Ini dalam Sejarah: Filipina Deklarasikan Kemerdekaan dari Spanyol*. Juni 12. Accessed April 25, 2019. <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/12/19300041/hari.ini.dalam.sejarah.filipina.deklarasikan.kemerdekaan.dari.spanyol?page=all>.

penting bagi militer AS di Perang Vietnam adalah pangkalan di Filipina. Perjanjian Pangkalan Militer adalah penyebab terbesar dari gesekan dalam hubungan antara AS dan Filipina. Namun, mulai tahun 1965 serangkaian perjanjian antara kedua negara mengurangi ukuran dan jumlah pangkalan AS dan sewa pangkalan yang diperpendek. Pada tahun 1979, yurisdiksi formal atas wilayah pangkalan diserahkan kepada pemerintah Filipina dan Konstitusi tahun 1987 memformalkan proses dimana perjanjian basis dapat diperpanjang melampaui berakhirnya tahun 1991 dari sewa dasar. Perpanjangan perjanjian akhirnya ditolak oleh Senat Filipina dan pasukan AS ditarik dari pangkalan Filipina pada 1992.

Sifat dan keefektifan lembaga-lembaga politik Filipina sejak kemerdekaan telah menjadi perhatian khusus dari bekas kekuasaan kolonial yang membantu membangunnya. Bagi rakyat Filipina, lembaga-lembaga itu telah menentukan kemampuan atau ketidakmampuan untuk menjaga ketertiban sosial dalam negeri. Penindasan yang canggung atas perbedaan pendapat dan pemilihan curang presiden kedua negara itu, Elpidio Quirino, pada tahun 1949 menetapkan panggung untuk intensifikasi Pemberontakan Hukbalahap (Huk) yang dipimpin komunis, yang telah dimulai pada tahun 1946. Pemberontakan itu juga mencerminkan perasaan yang tumbuh dari ketidakadilan sosial di antara petani penyewa, terutama di Luzon tengah. Namun, penindasan pemberontakan lima tahun kemudian, disebabkan oleh bantuan militer Amerika serta pembukaan proses politik untuk partisipasi massa yang lebih besar, terutama selama kampanye Ramon Magsaysay, seorang tokoh kharismatik unik dalam politik Filipina yang terpilih sebagai presiden pada tahun 1953. Upaya Magsaysay pada reformasi sosial

dan ekonomi gagal sebagian besar karena pandangan konservatif legislatif dan birokrasi. Ketika Magsaysay meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1957, kepemimpinan negara jatuh ke wakil presidennya, Carlos P. Garcia. Selama masa kepresidenan Garcia dan penggantinya yang berpikiran reformasi, Diosdado Macapagal (1961-1965), kerusuhan biasanya disalurkan melalui proses pemilihan dan protes damai.

## **C. Filipina Pasca Kemerdekaan dan Hubungan dengan Amerika Serikat**

### **1. Masa Awal Kemerdekaan**

Pada November 1965, Ferdinand E. Marcos terpilih menjadi Presiden Filipina. Pemerintahannya menghadapi masalah ekonomi yang parah dan diperparah oleh korupsi yang merajalela, penggelapan pajak, dan penyelundupan. Pada tahun 1969, Marcos kembali terpilih menjadi Presiden Filipina dan pertama yang terpilih untuk memenangkan pemilihan dua kali berturut-turut. Platform kampanyenya termasuk negosiasi ulang perjanjian besar dengan AS dan perdagangan dengan negara-negara komunis. Janji-janji ini mencerminkan perubahan dalam konsep diri Filipina selama dekade 1960-an. Gagasan Filipina sebagai pos terdepan Kristen di Asia semakin digantikan oleh keinginan untuk mengembangkan identitas budaya Asia. Artis, musisi, dan penulis mulai mencari tema pra-Spanyol untuk inspirasi. Hal penting dalam periode ini adalah kecenderungan mencari identitas budaya melalui bahasa nasional, Pilipino. Namun, bahasa Inggris tetap menjadi bahasa bisnis, sebagian besar dokumen pemerintah, dan sebagian besar Perguruan Tinggi.

Marcos yang mendekati akhir masa jabatannya. yang dibatasi secara konstitusional selama delapan tahun memiliki tujuan yang lebih sempit. Ia mendesak untuk mengadopsi gaya pemerintahan parlementer yang akan memungkinkannya untuk tetap berkuasa. Dia takut bahwa konstitusi baru tidak akan berlaku sebelum dia kehilangan keuntungan dari jabatannya. Pada saat yang sama, investor asing terutama AS merasakan tekanan yang meningkat dari para nasionalis ekonomi di Parlemen Filipina.

Pada bulan September 1972, Marcos menyatakan darurat militer, mengklaim bahwa itu adalah pertahanan terakhir terhadap meningkatnya kekacauan yang disebabkan oleh demonstrasi mahasiswa yang semakin keras dan dugaan ancaman dari pemberontakan komunis yang didalangi oleh Partai Komunis Filipina (CPP), serta gerakan separatis Muslim dari Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF). Salah satu tindakan pertamanya adalah menangkap politisi oposisi di Kongres dan Konvensi Konstitusi. Reaksi publik awal terhadap darurat militer sebagian besar menguntungkan kecuali di wilayah Muslim di selatan, dimana pemberontakan separatis yang dipimpin oleh MNLF pecah pada tahun 1973. Meskipun upaya setengah hati untuk menegosiasikan gencatan senjata, pemberontakan terus mengklaim ribuan militer dan korban sipil. Pemberontakan komunis meluas dengan penciptaan Front Demokratik Nasional (NDF), sebuah organisasi yang merangkul CPP dan kelompok-kelompok komunis lainnya.

Di bawah hukum darurat militer, rezim mampu mengurangi kejahatan perkotaan yang penuh kekerasan, mengumpulkan senjata api yang tidak terdaftar, dan menekan pemberontakan komunis di beberapa daerah. Pada saat yang sama, serangkaian

konsesi baru yang penting diberikan kepada investor asing, termasuk larangan mogok oleh tenaga kerja terorganisi, dan program reformasi pertanahan diluncurkan. Pada Januari 1973, Marcos menyatakan ratifikasi konstitusi baru berdasarkan sistem parlementer, dengan dirinya sebagai Presiden sekaligus Perdana Menteri. Namun, Marcos tidak mengadakan legislatif sementara yang diminta dalam dokumen itu.

Kekecewaan rakyat dengan darurat militer dan dengan konsolidasi kontrol politik dan ekonomi oleh Marcos, keluarganya, dan rekan-rekan dekatnya tumbuh selama tahun 1970-an. Meskipun terjadi pertumbuhan dalam produk nasional bruto Filipina, pendapatan riil pekerja turun dan beberapa petani yang mendapat manfaat dari reformasi tanah, dan industri gula berada dalam posisi kebingungan. Penurunan tajam harga gula pada awal 1980-an ditambah dengan harga yang lebih rendah dan berkurangnya permintaan kelapa dan produk kelapa yang secara tradisional merupakan komoditas ekspor paling penting, menambah kesengsaraan ekonomi negara itu. Pemerintah terpaksa meminjam dana dalam jumlah besar dari komunitas perbankan internasional. Hal yang juga meresahkan bagi rezim ini adalah laporan-laporan korupsi yang meluas mulai muncul ke permukaan dengan frekuensi yang semakin meningkat.

Pemilihan untuk Majelis Nasional sementara akhirnya diadakan pada tahun 1978. Oposisi yang dipimpin oleh mantan senator Benigno S. Aquino, Jr. menghasilkan kampanye yang begitu berani dan populer. Pada tahun 1980, Aquino diizinkan pergi ke pengasingan di Amerika Serikat dan pada tahun berikutnya setelah mengumumkan penangguhan darurat militer, Marcos memenangkan pemilihan

yang hampir tidak terbantahkan untuk masa jabatan enam tahun berikutnya.

## **2. Filipina Kembali Pada Sistem Demokratis**

Pembunuhan terhadap Benigno Aquino, ketika dia kembali ke Manila pada Agustus 1983 dan dianggap oleh rakyat sebagai pekerjaan dari militer menjadi titik fokus dari oposisi untuk semakin menentang Marcos. Pada akhir 1985, Marcos dibawah tekanan yang meningkat baik dari dalam maupun dari luar Filipina menyerukan pemilihan Presiden secara cepat untuk Februari 1986. Corazon C. Aquino, janda dari Benigno menjadi kandidat utama dari koalisi partai-partai oposisi. Namun pada akhirnya Marcos dinyatakan sebagai pemenang resmi pemilihan Presiden pada tahun tersebut, tetapi kemarahan publik yang kuat atas hasil pemilu memicu pemberontakan yang pada akhirnya mendorong Marcos untuk lengser dari kekuasaan. Corazon Aquino kemudian menjadi Presiden Filipina.

Popularitas pribadi Aquino yang luar biasa dan dukungan internasional yang meluas sangat berperan dalam pembentukan pemerintahan baru. Tidak lama setelah menjabat, Ia menghapuskan konstitusi tahun 1973 dan mulai memerintah dengan dekrit. Sebuah konstitusi baru dirancang dan disahkan pada Februari 1987 dalam referendum umum, kemudian pemilihan legislatif pada Mei 1987 dan penyelenggaraan kongres bikameral baru pada bulan Juli menandai kembalinya bentuk pemerintahan yang demokratis sebelum diberlakukannya darurat militer oleh Marcos pada tahun 1972.

Euforia atas pemecatan Marcos terbukti berumur pendek. Pemerintah baru telah mewarisi

utang luar negeri yang sangat besar, ekonomi yang sangat terkuras, dan ancaman yang semakin besar dari Moro dan pemberontak komunis. Pemerintahan Aquino juga harus menghadapi pertikaian internal yang besar, upaya kudeta yang berulang dan bencana alam seperti gempa bumi besar dan letusan Gunung Pinatubo tahun 1991. Dimulainya kembali politik partisan aktif adalah awal dari penyebab berakhirmya koalisi yang telah membawa Aquino ke kekuasaan. Pada awal 1990-an muncul kritikan terhadap pemerintahan Aquino yaitu tuduhan kepemimpinan yang lemah, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia sudah mulai melekat.

### **3. Filipina Pada Dekade 1990-an Hingga Sekarang**

Pada pemilihan Presiden Filipina Mei 1992, memunculkan nama Fidel Ramos sebagai pemenangnya, Ramos memperoleh kurang 24 persen suara sah secara keseluruhan. Ramos adalah mantan Kepala staf militer dan Menteri Pertahanan di bawah pimpinan Aquino. Ramos tidak populer di beberapa tempat karena dia telah memimpin agensi yang dituduh menegakkan darurat militer dibawah Marcos sebelum berbalik melawan Marcos untuk memberikan dukungan penting kepada Aquino pada tahun 1986. Beberapa pengamat dengan cemas mencatat selama pemilihan bahwa pemenang mungkin iri pada yang kalah dan memang Ramos mewarisi tanggung jawab untuk berurusan dengan pemberontakan dari kanan dan kiri, selain itu krisis energi parah yang menghasilkan pemadaman listrik setiap hari, infrastruktur yang rusak dan kurang memadai, hutang luar negeri yang besar, dan masalah-masalah populasi yang setengahnya tinggal di bawah garis kemiskinan.

Pemerintahan Ramos memperbaiki krisis energi dan melanjutkan untuk menciptakan lingkungan yang ramah untuk pemulihan ekonomi. Perdamaian berhasil dinegosiasikan dengan kelompok pemberontak MNLF, namun masih gagal dengan kelompok pemberontak NDF. Ekonomi yang lebih terbuka diciptakan melalui serangkaian reformasi kebijakan ekonomi makro. Akibatnya, pada saat krisis keuangan Asia yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997, ekonomi Filipina cukup stabil untuk menghindari kerusakan serius. Kebijakan keamanan dan luar negeri yang proaktif mencegah memburuknya hubungan dengan Tiongkok, salah satu dari beberapa negara di mana Filipina membantah klaim terhadap pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Kebijakan luar negeri Ramos juga mendapatkan keuntungan diplomatik positif bagi Filipina di dunia internasional.

Terpilihnya Joseph Ejercito Estrada menjadi Presiden pada pemilihan Presiden bulan Mei 1998, membawa Filipina berbalik dari banyak pencapaian ekonomi, politik, dan diplomatik di era pemerintahan Ramos. Meskipun Estrada umumnya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik pada tahun pertama pemerintahannya, Ia kemudian mendapat kecaman sebagian besar karena kegagalannya untuk memenuhi janji-janji untuk mengurangi kemiskinan dan untuk membuka perekonomian lebih jauh ke perusahaan swasta. Estrada dimakzulkan pada November 2000, didakwa melakukan suap korupsi dan kolusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, dan pelanggaran konstitusi. Penolakan sekutu senator Estrada untuk membuka sebuah amplop yang diduga memiliki bukti terhadapnya selama persidangan memicu pemberontakan dari rakyat. Pemberontakan akhirnya menyebabkan

penggulingan Estrada, penangkapan, penahanan, dan persidangan berikutnya di depan *Sandiganbayan* (Pengadilan Korupsi Filipina).

Pada Januari 2001, Gloria Macapagal-Arroyo yang merupakan mantan Wakil Presiden Estrada, resmi dilantik sebagai presiden ke-14 negara itu. Seorang putri mantan Presiden Diosdado Macapagal dengan gelar doktor di bidang ekonomi, Arroyo dihadapkan pada tantangan memimpin demokrasi yang tetap didominasi oleh elit, merangsang ekonomi untuk tumbuh lebih cepat daripada populasi negara, menyediakan pekerjaan bagi rakyat Filipina. Meskipun berhasil melakukan pengurangan kemiskinan, serta penanggulangan korupsi di instansi pemerintahan, Arroyo harus berjuang dengan ketidakstabilan politik dan kejahatan yang meluas, termasuk penculikan yang semakin umum terjadi untuk tebusan. Dia sendiri terlibat dalam korupsi, yang menggerakkan para prajurit yang kecewa untuk melakukan kudeta pada tahun 2003. Kudeta itu gagal, dan Arroyo terpilih kembali menjadi Presiden pada tahun 2004. Namun kemudian dugaan tentang perbaikan pemilihan dan pendekatan yang semakin represif kepada pemerintah, memicu panggilan untuk *impeachment* dan memicu kudeta kedua pada tahun 2006, namun sekali lagi kudeta gagal. Arroyo kemudian mendeklarasikan "keadaan darurat" dan melarang semua demonstrasi publik. Meskipun deklarasi tersebut dengan cepat dicabut, gerakan itu secara luas dianggap sebagai lambang dari pemerintahan otoriter.

Sepanjang kekacauan di lembaga eksekutif Filipina, isu-isu politik dan ekonomi terus membayangi Filipina di bidang-bidang lain. Di bagian Selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim, terjadi kerusuhan yang semakin militan dan meluas menjadi keprihatinan yang terus meningkat.

Sedangkan dibagian Utara, gerakan terpadu sedang dilakukan untuk merumuskan kembali konstitusi negara. Di isu internasional, pengiriman uang dari warga Filipina di luar negeri (yang telah menjadi komponen penting ekonomi) terancam karena negara-negara tetangga yang menjadi tempat bekerja warga Filipina melakukan peninjauan ulang undang-undang mereka mengenai pekerjaan asing dan mengancam akan mendeportasi pekerja yang tidak berdokumen.

Pemilihan presiden dan parlemen tahun 2010 menampilkan sejumlah kandidat baru dengan nama yang sudah dikenal publik. Salah satunya yaitu Benigno S. ("Noynoy") Aquino III, putra dari Benigno dan Corazon Aquino yang merupakan calon Presiden dari koalisi yang dipimpin oleh Joseph Estrada. Selain itu, Arroyo, Imelda Marcos, dan bintang tinju Manny Pacquiao masing-masing memenangkan kursi di Parlemen. Pada Oktober 2012, Aquino mengumumkan kesimpulan dari kesepakatan damai dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang akan memberikan tingkat otonomi yang signifikan ke wilayah mayoritas Muslim di pulau Mindanao selatan. Konflik empat dekade telah merenggut sekitar 120.000 nyawa dan menelantarkan sekitar dua juta orang.

Pada awal November 2013, sebagian besar kawasan Filipina Tengah dihancurkan oleh Topan Super Haiyan, topan tropis besar yang memotong petak luas sekitar 800 mil (800 km) panjang melintasi beberapa pulau sebelum keluar ke Laut Cina Selatan. Ribuan orang terbunuh, dan ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Itu adalah yang paling parah dari beberapa bencana alam yang melanda negara itu tahun itu, termasuk topan pada bulan Agustus dan Oktober dan gempa berkekuatan 7,1 skala Richter, juga pada bulan Oktober.

Mungkin masalah kebijakan luar negeri yang paling mendesak bagi Filipina pada tahun 2010 adalah sikap Tiongkok yang semakin tegas di Laut Cina Selatan. Ketika Filipina berupaya meningkatkan kekuatan militernya yang lemah, pada tahun 2014 Filipina mengajukan kasus ke Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag. Mereka meminta putusan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut mengenai terumbu karang yang berada di dalam perairan teritorial Filipina. Tiongkok mengklaim kepemilikan perairan yang dekat dengan Filipina dan pada bulan April 2015 memulai pembangunan pulau buatan di Fiery Cross Reef, yang meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Pada Juli 2016 pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti klaim historis Tiongkok atas perairan dan memutuskan bahwa Tiongkok telah melanggar hak kedaulatan Filipina. Selain itu, dinyatakan bahwa program pembangunan pulau oleh Tiongkok telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Para pejabat dari Filipina menyambut keputusan itu, tetapi Tiongkok menolak keputusan tersebut dan mengklaim bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi dan mekanisme penegakan hukum apa pun.

Dalam pemilihan Presiden Filipina tahun 2016, dimenangkan oleh Rodrigo Duterte, mantan walikota Kota Davao. Duterte berhasil menarik simpati rakyat Filipina dengan retorika populis dan platform anti-korupsi yang luas. Dalam kampanyenya Duterte berjanji untuk mengeksekusi 100.000 penjahat dan pada saat pelantikannya pada bulan Juni 2019, di Filipina ada lonjakan dramatis dalam pembunuhan di luar proses hukum terhadap tersangka pengedar narkoba.